

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan politik negara Indonesia yang belandaskan asas demokrasi memerlukan kecakapan dalam partisipasi politik secara aktif yang harus terimplementasi secara efektif. Hal ini karena setiap golongan memiliki beragam kepentingan yang harus diperjuangkan dan dipenuhi oleh negara. Begitu pula dengan kaum wanita yang dikenal sebagai bagian diskriminasi sosial harus dapat mengembangkan diri untuk bersikap responsif dan partisipatif dalam berbagai bidang kehidupan terutama pada kehidupan politik dalam menyampaikan aspirasinya sebagai input dalam pembuatan kebijakan publik (Jamaluddin, 2021).

Namun, berdasarkan realita yang ditemui dalam sistem kehidupan masyarakat terlihat adanya ketidakseimbangan pada peran dan partisipasi politik kaum pria dan wanita di Indonesia. Meskipun sesungguhnya, negara telah membuka ruang gerak bagi wanita untuk dapat mengambil peran dalam dunia politik. Hal ini sejalan dengan adanya kebijakan afirmatif yang mengharuskan pada setiap partai politik memiliki kader minimal 30 % dari keseluruhan jumlah kader dalam partai tersebut. Akan tetapi praktek yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa memaksimalkan keterlibatan wanita dalam dunia politik bukanlah hal yang mudah (Kiftiyah, 2019).

Mengurai pernyataan di atas dilangsir melalui www.kemenpppa.go.id, pada hasil Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif

nasional berada pada angka 20,8 persen dengan jumlah 120 orang anggota DPR-RI perempuan dan 575 orang laki-laki. Data yang diperoleh melalui KPU pada tahun 2019 ini menunjukkan keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif belum berhasil mencapai target 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P berargumen bahwa keterlibatan wanita dalam bidang politik akan menciptakan iklim yang sehat dalam dunia politik di Indonesia.

“Semakin banyak perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif, maka demokrasi di Indonesia akan semakin sehat. Menurut saya cuaca politik di Indonesia cukup cerah bagi kaum perempuan untuk mengambil peran. Oleh karenanya, saya optimis keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bisa melampaui angka 30 persen tahun 2024 nanti”(dikutip dalam kemenpppa.go.id,04/01/2021).

Rendahnya minat wanita untuk terjun dalam dunia politik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti proses sosialisasi politik yang lebih mengedepankan peran kaum pria, kemudian adanya faktor situasional dimana wanita dituntut bertanggungjawab penuh dalam mengurus anak-anak di rumah, terlebih faham mengenai budaya *Patriarki*, menyebabkan kedudukan wanita dalam kehidupan sosial lebih rendah dibandingkan pria. Keadaan-keadaan tersebut menempatkan wanita pada posisi bersalah ketika berbenturan dengan adat dan kewajiban ganda yang harus dilakoninya apabila tetap terjun dalam dunia politik (Mukarom, 2008).

Problematika yang terjadi akibat rendahnya minat wanita untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik ini dapat diatasi dengan proses pendidikan baik secara formal maupun informal. Secara formal wanita dapat menempuh pendidikan di bangku sekolah hingga perguruan tinggi, sedangkan secara informal dapat diperoleh melalui penyuluhan, seminar, kegiatan organisasi melalui program yang terstruktur dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kehadiran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai organisasi penggerak kaum wanita juga seharusnya dapat membangun sinergitas dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis di tingkat desa. Dengan memaksimalkan penanaman nilai-nilai kebebasan, persamaan pada semua lapisan masyarakat terkhusus kaum wanita, baik yang menempuh pendidikan formal maupun yang tidak pernah menempuh pendidikan formal, baik dalam kondisi masyarakat yang homogen ataupun heterogen (Afkhami & Eisenberg, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, pada pelaksanaan program PKK ditemui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program yang telah ditetapkan, seperti dari segi komunikasi, sumber daya, sikap dan komitmen, serta struktur birokrasinya. PKK memiliki sepuluh program pokok yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila bertujuan agar dapat menciptakan keluarga yang paham akan nilai-nilai Pancasila. Program ini di Desa Laut Dendang terlaksana dalam kegiatan pengajian yang dilakukan Ibu-Ibu satu kali dalam seminggu di hari jum'at. Kemudian, program gotong royong yang

terlaksana di Desa Laut Dendang bersifat kerjasama dalam kebersihan lingkungan. Ketiga, program pangan menjamin ketersediaan pangan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, di Desa Laut Dendang program pangan yang dilaksanakan PKK adalah kegiatan masak-memasak yaitu memasak nasi tumpeng ataupun nasi kuning. Keempat program sandang belum terlaksana dalam kegiatan PKK di Desa Laut Dendang. Kelima program perumahan dan tata laksana rumah tangga belum terlaksana dalam kegiatan PKK di Desa Laut Dendang. Keenam program pendidikan dan keterampilan yang terlaksana di Desa Laut Dendang yaitu pendidikan anti narkoba. Ketujuh, program kesehatan yang terlaksana adalah kegiatan senam kebugaran jasmani yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu pada setiap dusun. Kedelapan, program pengembangan kegiatan berkoperasi dalam kegiatan PKK dan kepengurusan PKK di Desa Laut Dendang tidak terdapat kegiatan berkoperasi. Kesembilan, program kelestarian lingkungan hidup yaitu kegiatan kebersihan dalam PKK di Desa Laut Dendang yang terlaksana secara kondisional tanpa jadwal yang tetap. Kesepuluh, program perencanaan sehat seperti sosialisasi program keluarga berencana dan sebagainya tidak terlaksana.

Sedangkan secara spesifik pelaksanaan pendidikan politik didukung dengan terdapatnya program PKK dalam bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta program pendidikan dan keterampilan. Pelaksanaan program PKK ini ditujukan kepada para wanita dalam ruang lingkup desa maupun kelurahan. Menelisik mengenai kedua program pokok PKK dari sepuluh program pokok yang tersusun, menjadi landasan utama bahwa PKK dapat berperan sebagai agen

dalam pendidikan politik para wanita untuk ikut berpartisipasi aktif dalam dunia perpolitikan (Updesa, 2022).

Melalui beberapa pilihan yang paling mendukung untuk pelaksanaan pendidikan pada kaum wanita pada usia 18-50 tahun adalah melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK sebagai jalur penunjang pelaksanaan pendidikan politik dapat mendorong peningkatan kualitas wanita dalam mengaplikasikan diri sebagai aktor dalam jalur utama pendidikan politik di keluarga. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus dapat mendorong dan memajukan pola pikir wanita dalam bidang sosial politik. Kehadiran PKK merupakan penyokong kemajuan kaum wanita untuk berekspresi dalam kehidupan sosial politik. Dengan meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan sikap peka sosial dalam diri para wanita untuk menunjang kehidupan politik yang benar-benar demokratis (Rantung, Mandey, & Londa, 2018).

Pada kenyataan yang ditemui di lapangan aktifitas PKK tidak berjalan rutin sebagaimana mestinya. Kontribusi PKK dalam kegiatan bersifat sosial politik sangat rendah bahkan tidak terlihat sama sekali. Keberadaan PKK dalam suatu desa atau kelurahan dipandang sebagai suatu formalitas tanpa aktifitas. Dalam kurun waktu yang cukup lama, PKK dianggap tidak berhasil menjalankan program-program yang menjadi kewajibannya untuk mewujudkan kualitas wanita yang mampu berkontribusi dalam dunia politik. Begitu pula problematika yang terjadi di Desa Laut Dendang.

Sangat disayangkan, di desa yang berpenduduk heterogen ini dengan kuantitas wanita usia dewasa yang cukup banyak tersebut, kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak terlihat jelas perwujudannya, pada beberapa jenis program yang harusnya terealisasikan secara maksimal. Kemudian, kegiatan berjenis pendidikan politik untuk mengembangkan pola pikir kritis dan sikap responsif serta partisipatif di kalangan wanita dewasa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fakta-fakta yang muncul berdasarkan hasil observasi awal, menunjukkan adanya ketimpangan antara peran dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan anggota PKK Desa Laut Dendang dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja berdampak signifikan pada pelaksanaan pendidikan politik yang terkait dengan program pertama PKK berupa penghayatannilai-nilai Pancasila.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Ibu Elmiyan selaku sekretaris PKK pada wawancara awal yang dilakukan pada 30 Desember 2021. Menurut paparan beliau, bahwa kegiatan PKK di Desa Laut Dendang di dominasi oleh kegiatan bersifat keagamaan seperti pengajian rutin setiap minggunya yang dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan mengundang seorang penceramah. Kemudian, kegiatan bersifat kesehatan seperti senam setiap minggunya yang dilaksanakan pada sore hari setiap hari Jum'at pada setiap dusun secara bergantian. PKK di Desa Laut Dendang sebenarnya tergolong aktif meskipun tidak melakukan rutinitas secara maksimal semasa munculnya pandemi Covid-19. Berdasarkan keterangan yang beliau ungkapkan bahwa pada dua tahun silam PKK pernah melaksanakan kegiatan berjenis pendidikan dan pelatihan yang

mendukung pelaksanaan pendidikan politik dengan kegiatan sosialisasi akan kesaadaran hukum bagi kaum wanita sebagai anggota PKK. Tetapi, untuk menghindari terciptanya kerumunan, kegiatan semacam ini tidak boleh dilakukan lagi, hingga menyebabkan PKK di Desa Laut Dendang minim akan pelaksanaan kegiatan berjenis pendidikan politik.

Meskipun demikian, PKK tetap eksis hingga saat ini dibawah kepemimpinan Ibu Sadarna dengan mengaplikasikan program bersifat keagamaan yang menurutnya mampu membangun karakter religius bagi para Ibu-Ibu anggota PKK tersebut. Selanjutnya kegiatan bersifat kesehatan sebagai pemenuhan program kesehatan bagi kaum Ibu yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan imunitas tubuh para wanita tersebut yang menjadi pusat perkembangan keluarga.

Terdapat pula beberapa program lainnya yang terlaksana selama dua tahun ini, seperti kegiatan khusus untuk lansia yang dilakukan para Ibu-Ibu PKK dengan sosialisasi kesehatan dan sebagainya, kemudian senan aerobic khusus wanita pedesaan, perayaan Hari Ibu yang dilakukan setiap tanggal 22 Desember, kegiatan memasak seperti memasak nasi tumpeng sebagai masakan yang bersifat filosofis kebudayaan, hingga pelaksanaan pendidikan anti narkoba yang dilaksanakan dengan kerjasama bersama yayasan Atikyatudiyah.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan ataupun program PKK, harus memperoleh persetujuan Bapak Suwardi Sebagai Kepala Desa Laut Dendang. Terkait pendanaan dalam kegiatan PKK bersumber dari anggaran dana desa yang

merupakan anggaran pembelanjaan desa dengan kualifikasi pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Karena program-program PKK bersifat membangun dan memajukan sumber daya manusia yang merupakan salah satu visi dan misi dari Desa Laut Dendang.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa di Desa Luat Dendang kegiatan PKK masih terlaksana meskipun tidak berjalan maksimal dan efektif. Kegiatan bersifat kebudayaan, kesehatan dan keagamaan dapat dijalankan oleh PKK dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara rutin, misalnya pengajian rutin dalam seminggu satu kali pelaksanaan, kesehatan dan kebugaran jasmani melalui senam terlaksana satu kali dalam seminggu yang dilakukan dalam kawasan setiap dusun berbeda, peringatan hari Ibu yang dilakukan satu tahun satu kali, serta kegiatan masak-memasak dilakukan kondisional sesuai kebutuhan. Tetapi, permasalahan yang kemudian timbul dari realita ini adalah tidak terlaksananya secara jelas dan terencana kegiatan berjenis pendidikan yang secara khusus adalah pendidikan politik dengan menekankan pada point nomor satu sebagai program utama PKK. Padahal program penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila diletakkan sebagai program nomor satu dengan tujuan pelaksanaannya diharuskan terimplementasi secara rutin, terstruktur, terencana dan efektif di masyarakat khususnya untuk kaum wanita yang pada umumnya apatis akan kajian sosial politik.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana peran PKK secara efektif dalam pelaksanaan pendidikan politik dengan acuan pada program wajib PKK yang terdapat pada program nomor satu

yaitu pengamalan dan penghayatan nilai Pancasila dan program nomor enam pendidikan dan keterampilan. Peneliti memilih Desa Laut Dendang sebagai lokasi penelitian disebabkan peneliti menemui ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan rutin PKK di Desa Laut Dendang dengan pelaksanaan program wajib PKK yang seharusnya terlaksana secara maksimal. Problematika tersebut, juga menyebabkan pendidikan politik tidak terlaksana dalam kegiatan rutin PKK, sehingga anggota PKK masih mengalami kebingungan dalam menanggapi isu-isu berbau sosial politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kaum Wanita Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Program pengamalan dan penghayatan Pancasila tidak terlaksana secara maksimal, terlaksana hanya pada kegiatan bersifat keagamaan seperti pengajian rutin yang dilakukan setiap hari jum'at.
2. Program perumahan dan tata laksana rumah tangga tidak terlaksana dalam kegiatan PKK di Desa Laut Dendang.
3. Program pengembangan kegiatan berkoperasi tidak terlaksana dalam kegiatan PKK di Desa Laut Dendang.

4. Program PKK dalam bidang pendidikan dan keterampilan tidak terlaksana maksimal , program pendidikan yang terlaksana hanya pendidikan anti narkoba..
5. Kegiatan berbentuk pendidikan dengan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sejak dua tahun terakhir, karena terhalang pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Peran pemberdayaan kesejahtraan keluarga (PKK) dalam pelaksanaan pendidikan politik kaum wanita berdasarkan program penghayatan dan pengamalan Pancasila serta program pendidikan dan keterampilan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran PKK dalam pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila sebagai program wajib PKK dalam mendukung pendidikan politik di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

2. Bagaimana peran PKK dalam pelaksanaan pendidikan dan keterampilan sebagai program wajib PKK dalam mendukung pendidikan politik di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai program wajib PKK dalam mendukung pendidikan politik di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan keterampilan sebagai program wajib PKK dalam mendukung pendidikan politik di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis manfaat yang ingin dicapai, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap khsanah ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam mengembangkan

wawasan penulis untuk terus mendalami kajian ilmu pada tema ini.

- 2) Hasil kajian pada penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber literasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti dengan tema sejenis dengan probelmatika yang serupa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan skripsi, sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- 2) Untuk pemerintah, penelitian ini dapat menjadi acuan atau monitoring efektifitas program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) pada program penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila serta program pendidikan dan pelatihan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik pada kaum wanita.
- 3) Untuk masyarakat, penelitian ini berupaya membangun minat masyarakat terkhusus kaum wanita untuk dapat bersikap responsif dan partisipatif dalam setiap pelaksanaan program PKK yang mendukung terlaksananya pendidikan politik.